



## Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Prevalensi Stunting Di Kota Bandung Tahun 2023

Dady Ramli<sup>1)</sup> Novie Indrawati Sagita<sup>2)</sup> Jajang Sutisna<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

[Dadyramli86@gmail.com](mailto:Dadyramli86@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id](mailto:novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id)<sup>2)</sup>  
[Jajangsutisna@unpad.ac.id](mailto:Jajangsutisna@unpad.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kota Bandung yang mencapai 19,4% pada tahun 2022 - jauh di atas target 14%. Untuk menurunkan angka tersebut dan memenuhi target, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk intervensi yang tepat sasaran, program-program inovatif, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kerangka teori yang digunakan adalah Strategi Pemerintah Geoff Mulgan, yang dianalisis melalui lima dimensi: tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan beberapa masalah dalam strategi pengurangan stunting di Kota Bandung. Hal ini mencakup keterbatasan kemampuan di antara organisasi lokal dalam Tim Percepatan Pengurangan Stunting, yang memengaruhi komunikasi, koordinasi, dan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan pengukuran balita oleh petugas kesehatan masyarakat, distribusi program makanan tambahan yang tidak merata, serta upaya komunikasi dan edukasi yang kurang optimal oleh tim terkait. Faktor-faktor ini telah menghambat kota ini untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14%.

**Kata kunci:** Strategi Pemerintah, Stunting, Pemerintah Daerah, Kota Bandung

### Abstract

*This research is driven by the high stunting rate in Bandung City, which reached 19.4% in 2022—well above the target of 14%. To reduce this rate and meet the target, the Bandung City Government has implemented various initiatives, including targeted interventions, innovative programs, and collaborations with community stakeholders. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, gathering data through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using a purposive sampling technique. The theoretical framework is based on Geoff Mulgan's Government Strategy, analyzed through five dimensions: purpose, environment, direction, action, and learning. The findings indicate several issues in Bandung City's stunting reduction strategy. These include limited capabilities among local organizations in the Stunting Reduction Acceleration Team, which affects effective communication, coordination, and budget use. Additionally, there are inaccuracies in toddler measurement records by community health workers, uneven distribution of supplementary food programs, and suboptimal communication and educational efforts by relevant teams. These factors have prevented the city from reaching its stunting reduction target of 14%.*

**Key words:** Government Strategy, Stunting, Local Government, Bandung City



## PENDAHULUAN

Menurut *Economic Commission for Latin America and the Caribbean* (ECLAC) dan *World Food Programme* (WFP) (2017) menyatakan bahwa malnutrisi pada bayi dan balita memiliki dampak ekonomi yang besar terhadap sebuah negara. Sebuah riset yang mengkaji mengenai dampak serta biaya yang ditimbulkan dari beban ganda malnutrisi terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas di Amerika Latin mengungkapkan bahwa malnutrisi berdampak negatif terhadap angka kesakitan dan kematian, inklusi tenaga kerja dan sosial, dan produktivitas. Stunting merupakan salah satu indikator yang diterima secara luas mengenai penurunan produktivitas masyarakat suatu negara pada masa yang akan datang. Anak-anak yang mengalami stunting pada umumnya akan tumbuh menjadi anak yang kurang berpendidikan, memiliki pendapatan serta kualitas hidup yang rendah, dan rentan mengalami penyakit tidak menular. Stunting merupakan salah satu keadaan malnutrisi yang berkaitan dengan kekurangan zat gizi di masa lalu sehingga tergolong kedalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, serta jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi ataupun panjang badan balita menyebabkan kejadian stunting sulit disadari oleh masyarakat.

Dengan demikian, menjadikan stunting sebagai salah satu fokus target perbaikan gizi di dunia hingga 2025. Stunting atau perawakan pendek (*shortness*) merupakan suatu keadaan tinggi badan (TB) seseorang yang tidak sesuai dengan umur, yang penentuannya berdasarkan perhitungan skor Z-indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). seseorang dapat dikatakan stunting apabila skor z-indeks TB/U-nya di bawah -2 Standar Deviasi (SD). Stunting bisa terjadi sebagai akibat dari asupan gizi yang kurang, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, tingginya kesakitan, ataupun merupakan kombinasi dari keduanya. Kondisi tersebut acap kali dijumpai di negara dengan kondisi ekonomi kurang. Stunting dimulai ketika janin masih dalam kandungan dan serta baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Kekurangan gizi pada anak usia dini berdampak pada meningkatnya angka kematian bayi dan anak, sehingga menyebabkan penderitanya mudah sakit serta memiliki postur tubuh yang kurang maksimal saat dewasa. Selain itu, kemampuan kognitif para penderitanya juga berkurang sehingga mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi negara (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002; Unicef, 2013).

Stunting diakibatkan oleh faktor yang multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil ataupun anak balita. Maka dari itu, diperlukan intervensi yang menentukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita guna mengurangi tingkat prevalensi stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat kesehatan yang sangat penting sebab memiliki dampak yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia dalam satu generasi. Tingginya kejadian stunting pada balita disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab utamanya yaitu kurangnya asupan nutrisi serta adanya penyakit infeksi (Unicef, 1990; Hoffman, 2000; Umata, 2003). Faktor lainnya yaitu kurangnya pengetahuan ibu, pola asuh yang salah, hygiene dan sanitasi yang buruk, serta rendahnya pelayanan kesehatan (Unicef, 1990). Selain itu, belum ada kesadaran masyarakat yang memandang bahwa anak yang menderita stunting merupakan suatu masalah, sebab di masyarakat mereka terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditangani. Selain itu, keadaan gizi ibu waktu hamil, serta belum ada kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi selama kehamilan yang berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkan. (Unicef Indonesia, 2013). Adapun faktor lain yang erat kaitannya dengan kejadian stunting yakni terjadinya kurang energi kronis (KEK) pada wanita usia subur 15-49 tahun, baik hamil maupun tidak hamil. Stunting juga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastris (2012) menyebutkan bahwasanya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan status gizi, yang mana prevalensi anak stunting lebih banyak ditemui pada ibu yang berpendidikan rendah ketimbang dengan ibu yang tingkat

pendidikannya tinggi. Par'i, dan Utami (2017) menyebutkan bahwasanya pengetahuan pemberian makan, pengetahuan gizi ibu, serta pengetahuan kebersihan diri berpengaruh terhadap peningkatan status gizi, dimana perbaikan gizi masyarakat berpotensi untuk menekan kasus stunting. Selain itu, kemiskinan serta karakteristik wilayah juga dianggap berpengaruh terhadap gizi balita (Van de Poel 2007: Khan dan Kraimer 2009 dalam Aryasami dan Tarigan 2017), dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka Panjang. Selain itu, berdasarkan penelitian kohort prospektif di Jamaika yang dilakukan pada kelompok usia 9-24 bulan, serta diikuti perkembangan psikologisnya ketika berumur 17 tahun, diketahui bahwa remaja yang pertumbuhannya terhambat memiliki tingkat kecemasan dan gejala depresi lebih tinggi, dan memiliki harga diri (*self esteem*) yang rendah ketimbang remaja yang tidak terhambat pertumbuhannya. Anak-anak yang sebelum berusia 2 tahun terhambat pertumbuhannya memiliki hasil yang lebih buruk dalam emosi serta perilaku di saat remaja (Walker et al 2007).

Namun demikian, selama 2 dekade terakhir, penanganan masalah stunting sangat lambat. Secara global, persentase anak-anak yang pertumbuhannya terhambat hanya menurun 0,6% per tahun sejak tahun 1990. Secara global pada tahun 2010 prevalensi stunting sebesar 171 juta anak-anak yang mana 167 juta di antaranya terjadi di negara berkembang. Berdasarkan laporan dari *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste. Berdasarkan data dari *Asia Development Bank* tersebut menunjukkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia mencapai 31,8% pada tahun 2020. Prevalensi tersebut jauh melebihi negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam (22,3%), Malaysia (20,9%), Thailand (12,3%), bahkan Singapura tingkat prevalensi stuntingnya hanya sebesar 2,8% yang merupakan tingkat prevalensi terendah di Asia Tenggara. Kemudian, dalam interval waktu 2013 hingga 2018, prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan progres positif, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang diadakan pada tahun-tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia menurun dari awalnya 37,2% di tahun 2013 menurun menjadi 34% di tahun 2016 dan kemudian turun kembali menjadi 30,8% di tahun 2018. Perolehan positif dalam penanggulangan stunting di Indonesia pun terus berlanjut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan setiap tahun mulai dari tahun 2019. Data SSGI menunjukkan bahwa dalam kurun 3 tahun dari 2019-2022, tingkat prevalensi stunting di Indonesia berhasil diturunkan sebesar 6,1% dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Sebagaimana yang termaktub dalam RPJMN 2020-2023, Pemerintah Indonesia menargetkan di tahun 2024, tingkat prevalensi stunting nasional bisa mencapai 14% di tahun 2024. Artinya, dibutuhkan konsistensi penurunan sebesar 3,8% per tahun untuk mencapai target tersebut.

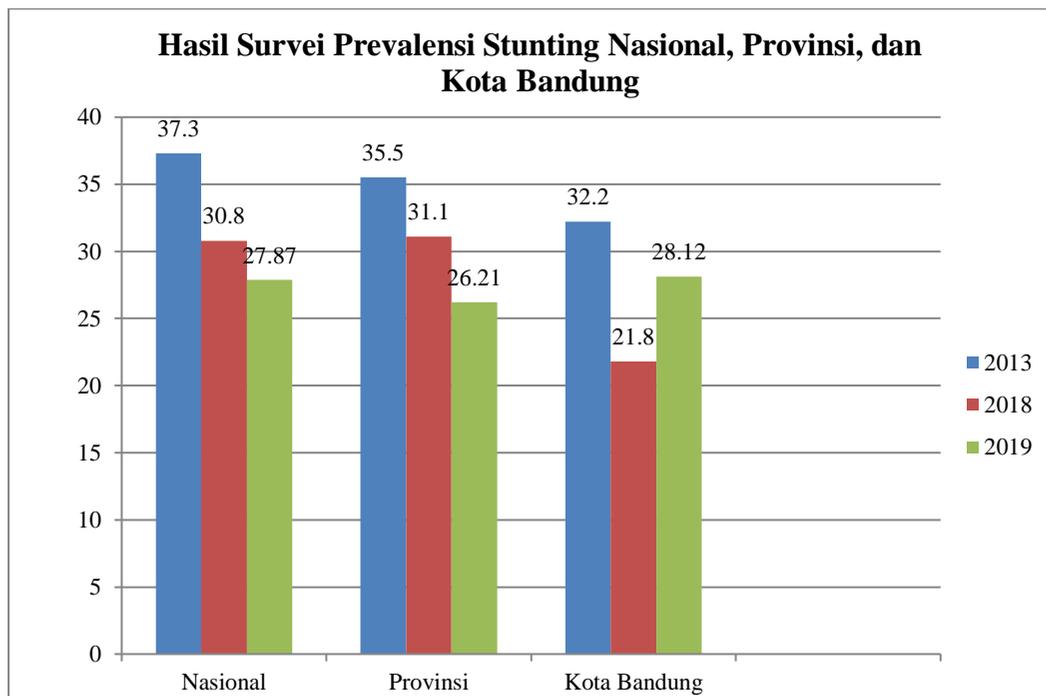
Dalam penanggulangan stunting di Indonesia, pemerintah telah menempuh berbagai cara dan strategi guna mengurangi tingkat prevalensi stunting, salah satunya dengan melakukan intervensi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan yang dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran program seperti Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan anak usia 0-6 Bulan, Ibu Menyusui dan Anak usia 7 hingga 23 bulan. Pemerintah juga melakukan intervensi sensitif yang dilakukan melalui pelbagai program kegiatan, di antaranya seperti penyediaan akses bersih, penyediaan akses terhadap sanitasi, salah satunya melalui program STBM, penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), fortifikasi bahan pangan oleh Kementerian Pertanian, pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua, pemberian pendidikan anak usia dini universal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program Keluarga Berencana (KB), pemberian edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi remaja, dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan ketahanan pangan dan Gizi (Bappenas 2013, TNP2K).

Selain hal tersebut, pemerintah juga membuat berbagai kebijakan dan program terkait upaya untuk mengurangi dan menangani prevalensi stunting. Pemerintah di tingkat pusat telah mengeluarkan beragam kebijakan dan regulasi yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan prevalensi stunting yang berlandaskan Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan. Pemerintah juga membuat kebijakan pemilihan lokasi fokus intervensi stunting pada tingkat kabupaten/kota yang didasarkan pada sejumlah indikator, diantaranya yaitu jumlah balita stunting, prevalensi stunting, serta tingkat kemiskinan. Salah satu wilayah yang ditetapkan menjadi prioritas intervensi stunting adalah Kota Bandung. Dari total 2,4 juta penduduk Kota Bandung, anak balita berjumlah 131,896 dan 8.121 diantaranya merupakan balita stunting (Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2019), angka tersebut kemudian menurun menjadi 7,568 balita pada tahun 2021. Sementara itu, Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013), data stunting di Kota Bandung mencapai 32,2% kemudian turun menjadi 21,8% pada tahun 2018. Lalu, berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia, prevalensi stunting di kota Bandung meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 28,12%. Angka tersebut berada di atas prevalensi Provinsi Jawa Barat yang sebesar 26,21%.

Grafik 1.

Prevalensi Stunting di Kota Bandung



Sumber: Kementerian Kesehatan (2018)

Meskipun prevalensi stunting menunjukkan tren yang menurun selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pada nyatanya prevalensi stunting di Kota Bandung masih belum mencapai target nasional stunting yang ditetapkan di angka 14%. Dengan demikian, guna mencapai target nasional tersebut, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 050/Kep.381-Bappelitbang/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bandung yang terdiri dari berbagai unsur Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting tersebut bertujuan agar pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat dilaksanakan lebih tersinergi dan konvergen. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan yang diterbitkan sesuai Keputusan Wali Kota No. 800/Kep-549-DPPKB/2022.

Disamping itu, Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengembangkan aplikasi E-PENTING (Elektronik Pencacatan Stunting) guna mengakselerasi digitalisasi publikasi serta informasi terkait data stunting terpadu yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023. Selain pengembangan aplikasi E-PENTING, Pemerintah Kota Bandung juga menginisiasi berbagai program lain guna mengurangi angka stunting yang terjadi di Kota Bandung, seperti program Bandung Tanggap Stunting dengan Pangan Aman dan Sehat

(Bandung Tanginas), Program Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Stunting (Pangersa), Dapur Sehat (Dashat, Buruan Sae, hingga Bangga Kagunan Septic Tank (Bang Kasep). Lalu Pemerintah juga mewajibkan kepada setiap perangkat daerah agar mengalokasikan/menyisihkan anggarannya sebesar 5% guna mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu, bagi kewilayahan dalam hal ini kecamatan dan kelurahan diwajibkan untuk menyisihkan 10% anggaran Program Inovasi Percepatan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK).

Namun demikian, meskipun sudah membuat berbagai kebijakan, pada nyatanya prevalensi stunting di Kota Bandung masih belum mencapai target nasional sebesar 14%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya seperti kolaborasi dan sinergi multisektoral yang belum maksimal meraih kelompok sasaran, pelaksanaan penurunan stunting di tingkat Kecamatan terutama Kelurahan belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan rembuk stunting secara mandiri. Contohnya, Rembuk Stunting Tingkat Kelurahan. Kegiatan rembuk yang dilaksanakan rutin awal tahun hanya berfokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Sumberdaya belum pada pembangunan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan TPPS baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan belum mendapat arahan, pendampingan serta pengawasan. Meskipun banyak dukungan dari akademisi, pihak swasta namun kolaborasi dan sinergi multisektoral belum fokus dalam program percepatan penurunan stunting. Hal ini menunjukkan bahwasanya upaya penyelesaian stunting yang terjadi di Kota Bandung masih memiliki beberapa permasalahan sehingga dibutuhkan komitmen yang serius dari Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mengatasinya.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di Kota Bandung tahun 2023, peneliti memilih melakukan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria memiliki wewenang untuk mengatur dan mengatasi permasalahan di bidang kesehatan khususnya stunting, memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penanganan dan percepatan penurunan stunting di Kota Bandung, peneliti menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan. Sumber yang akan peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi dan terdapat tiga teknik analisis data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kota Bandung menetapkan tujuan untuk menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target nasional 14%. Misi ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan kualitas hidup yang lebih baik dan tertuang dalam visi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Tujuan yang ditetapkan tersebut merupakan suatu upaya dalam membangun kualitas sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing, sehingga hal tersebut mencerminkan nilai dan kebutuhan Masyarakat serta selaras dengan poin satu misi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang termaktub dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing". Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain membentuk TPPS, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan beberapa strategi baik itu yang bersifat intervensi spesifik maupun intervensi sensitif seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemberian Tablet Tambah Darah, Pendampingan Calon Pengantin, Program Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Pra Sejahtera. Selain strategi-strategi yang dipaparkan di atas, Kota Bandung juga memiliki beragam inovasi kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting, diantaranya seperti TANGINAS, E-PENTING, Buruan SAE, BANG KASEP, Pangan

untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Stunting.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yakni menurunkan tingkat prevalensi stunting di Kota Bandung menjadi 14%, Pemerintah Kota Bandung membuat berbagai strategi mulai dari membentuk tim percepatan penurunan stunting, melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif, serta membuat berbagai inovasi untuk mempercepat penurunan stunting. Meskipun demikian, pada nyatanya tujuan tersebut tidak tercapai. Berdasarkan data dari SSGI, prevalensi stunting di Kota Bandung pada tahun 2023 hanya mencatatkan penurunan 3,1% ketimbang tahun lalu, dari yang asalnya 19,4% pada tahun 2022 turun menjadi 16,3% sehingga hal ini belum mencapai tujuan strategi yang ditetapkan yakni prevalensi stunting 14%.

Pemerintah memastikan strategi penurunan stunting sejalan dengan kondisi lingkungan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan anggaran yang meningkat. Dari aspek eksternal, strategi ini didukung dengan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, LSM, komunitas, dan media, yang menambah efektivitas intervensi di masyarakat.

Dalam aspek internal, berdasarkan penjelasan dari Kepala DPPKB Kota Bandung tersebut, untuk kapasitas internal yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam aspek keuangan terlebih lagi sumber daya manusia kurang mumpuni. Hal ini disebabkan karena dinas tersebut memiliki skala yang kecil untuk sebuah organisasi perangkat daerah, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keseluruhan ASN termasuk kepala dinas hanya berjumlah 30 orang yang tentunya jumlah tersebut kurang ideal untuk sebuah dinas, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, para ASN yang ada melakukan *multi tasking*, bahkan seorang kepala dinas pun ikut turun ke lapangan mengurus permasalahan teknis. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung merekrut tenaga tambahan yang akan bertugas di lini lapangan seperti merekrut tenaga Penggerak Bangsa Kencana sebanyak 151 orang yang akan bertugas di 151 Kelurahan di Kota Bandung, sementara untuk di ruang lingkup yang lebih kecil lagi, terdapat tim pendamping keluarga yang berjumlah 5800 orang untuk disebar di seluruh Kota Bandung. Lalu apabila dilihat dari segi keuangan dalam hal ini anggaran penanganan stunting, Dinas Kesehatan juga mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Untuk Dinas Kesehatan, anggaran penanganan stunting tahun 2023 mendapatkan alokasi sebesar Rp313.823.095.690 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp160.232.182.153 miliar atau sebesar 104% ketimbang tahun 2022 yang sebesar Rp153.590.913.537 miliar. Sementara itu, untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, anggaran penanganan stunting pada tahun 2023 yang dialokasikan untuk dinas tersebut adalah sebesar Rp36.758.883.960 miliar. Meskipun tidak sebesar anggaran dinas kesehatan, tetapi anggaran tersebut meningkat sebesar Rp7.319.936.525 miliar atau sekitar 25% ketimbang tahun lalu yang hanya diberikan anggaran sebesar Rp29.438.947.435 miliar. Sehingga, pada tahun 2023 ini, anggaran yang dialokasikan untuk dinas kesehatan maupun dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan. Dengan demikian, lingkungan internal dalam hal ini kapasitas sumber daya manusia dan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung mampu mendukung upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Selain kapasitas internal, dalam tahapan environment juga berbicara mengenai lingkungan eksternal dalam hal ini kemampuan Pemerintah Kota Bandung dalam menjaring dukungan masyarakat melalui kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai elemen di luar pemerintah seperti organ bisnis, komunitas, akademisi, media, dan lain-lain guna mendukung pencapaian tujuan. Berbicara mengenai kapasitas eksternal yang menjadi sub bahasan dalam tahapan environment, Kapasitas lingkungan eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sejatinya sudah mumpuni, hal tersebut dapat terlihat dari upaya Pemerintah Kota Bandung yang mendapatkan dukungan yang besar dalam mengentaskan permasalahan stunting di Kota Bandung. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kerja sama dan aksi kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang ada mulai dari lembaga swadaya masyarakat, akademisi, komunitas hingga media sehingga. Berbagai kolaborasi tersebut merupakan bukti bahwasanya Pemerintah Kota Bandung

memiliki kemampuan yang baik dalam menjaring dukungan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwasanya kapasitas eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung cukup mumpuni dalam mendukung pencapaian tujuan strategi yang ditetapkan yakni mencapai target prevalensi stunting Kota Bandung sebesar 14%.

Pemerintah Kota Bandung melalui arahan Wali Kota mendorong kolaborasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan pembagian tugas yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Arahan ini juga mencakup pedoman spesifik bagi implementasi intervensi sensitif dan spesifik untuk mempercepat penurunan stunting. Dalam menentukan arah dan tujuan dari strategi, Pemerintah Kota Bandung mengacu pada Peraturan Presiden Nomo 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang salah satunya mengatur tentang kelompok sasaran stunting, indikator-indikator intervensi spesifik dan sensitif, serta target nasional stunting, sehingga atas hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menetapkan bahwa tujuan dari adanya pelaksanaan strategi penurunan stunting adalah guna mencapai target prevalensi stunting di Kota Bandung di angka 14%. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Bandung membuat berbagai arahan guna pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dalam mempercepat penurunan stunting dapat berjalan optimal. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Penjabat Wali Kota selaku pengarah dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting memberikan arahan kepada berbagai OPD yang tergabung dalam TPPS Kota Bandung bahwasanya dalam penanganan stunting harus dilakukan kolaborasi pentahelix serta dalam melaksanakan program/kegiatan harus terukur dan jelas *jobdesc* dari masing-masing OPD, jangan sampai terjadi tumpang-tindih antara satu OPD dengan OPD yang lain agar manfaatnya lebih tepat sasaran.

Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga membuat inovasi yang diberinama web GIS yang merupakan suatu aplikasi berbasis website yang berisikan peta tematik geospasial Kota Bandung. Dalam Peta tematik geospasial tersebut, terdapat data *realtime* Persentase balita stunting di Kota Bandung per kelurahan. Adapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut:

Tabel 1.  
Regulasi Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting

No	Judul Regulasi	Kategori Regulasi	Nomor Regulasi
1	Perwal Pemberian ASI	Peraturan Bupati/Walikota	Perwal No.95 Tahun 2021
2	Perwal PIPPK	Peraturan Bupati/Walikota	Perwal No.27 Tahun 2021
3	SE Pelaksanaan Pemeriksaan Catin	Surat Edaran Bupati/Walikota	Surat Edaran No.440/SE.113-Bag.Kesra
4	SE ODF (Open Defecation Free)	Surat Edaran Bupati/Walikota	Surat Edaran No.440/SE.050-DINKES

Sumber: Hasil Penelitian, (2020)

Arahan tersebut tentunya sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting sebab dapat mengurangi permasalahan akses sanitasi kurang layak yang merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Lalu berkaitan hal tersebut, salah satu kecamatan di Kota Bandung, yaitu Kecamatan Arcamanik membuat suatu program inovasi yang bernama BANG KASEP atau bangga kagungan septictank sebagai upaya dalam meningkatkan akses sanitasi dengan cara membuat septictank melalui pinjaman dana tanpa bunga (mencicil) dengan mekanisme dana bergulir yang dikelola oleh masyarakat. Arahan-arahan tersebut diberikan oleh kepala daerah

dalam hal ini penjabat wali kota selaku pengarah dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bandung dan merupakan arahan yang jelas dipahami oleh OPD selaku pelaksana, sehingga dari arahan tersebut muncul tindak lanjut. Selain arahan langsung dari kepala daerah, terdapat pula arahan yang berupa peraturan yang berkaitan dengan penurunan stunting seperti Perwal Pemberian ASI, Perwal PIPPK, dan lain-lain yang mana dalam peraturan tersebut langkah-langkah yang jelas dan mampu memberikan ruang adaptasi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Langkah-langkah konkret diambil dengan memperkuat struktur kebijakan dan dukungan politik, termasuk pengalokasian anggaran tambahan dari DPRD. Dukungan ini memungkinkan pelaksanaan audit kasus dan distribusi bantuan langsung ke sasaran, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita yang berisiko stunting. Adapun rembuk stunting di Kota Bandung sendiri merupakan aksi ketiga dari delapan aksi integrasi konvergensi stunting yang dilaksanakan dalam skala nasional. Lalu tujuan daripada dilaksanakannya rembuk stunting adalah untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen dengan seluruh stakeholder terkait dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil analisis situasi yang telah disusun oleh Bappelitbang. Rembuk Stunting Tahun 2023 sendiri dilaksanakan secara luring dan dihadiri oleh Plh. Walikota Bandung, Perwakilan DPRD Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, Ketua PKK Kota Bandung, Akademisi, Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Komunitas, serta beberapa narasumber dari Technical Assistance LGCB ASR Dirjen Bina Bangda kemendagri dan Perwakilan Bappeda provinsi yang dilaksanakan pada 25 Juli 2023. Selain dalam rembuk stunting, komitmen dan dukungan politik juga dapat terlihat dari adanya kenaikan anggaran penanganan stunting di Kota Bandung ketimbang tahun lalu. Dimana pada tahun 2023, anggaran penanganan stunting mencapai Rp456.526.287.456 miliar. Anggaran tersebut meningkat sebesar 273.496.426.484 atau sekitar 149% ketimbang tahun 2022 yang sebesar Rp183.029.860.972 miliar.

Selain terdapat adanya dukungan dan komitmen dari pejabat politik, Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan aksi atau tindakan guna menurunkan prevalensi stunting di Kota Bandung tentunya membutuhkan koordinasi dan komunikasi efektif, mengingat banyaknya pihak dan stakeholder yang terlibat. Komunikasi dan koordinasi diperlukan agar aksi atau tindakan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting rutin melakukan rapat bulanan internal untuk membahas pelaksanaan pelayanan intervensi spesifik dan sensitif yang sudah dilakukan. Meskipun ada rapat koordinasi yang dilakukan antar OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting setiap bulan, tetapi koordinasi antar OPD dalam hal melaksanakan implementasi penurunan stunting masih kurang baik sehingga kerap kali terdapat miss koordinasi dan tumpang tindih tugas dalam melaksanakan implementasi penurunan stunting. Maka dari itu, ketika rapat tersebut dari Dinas Kesehatan mengintruksikan bahwa terkait hasil penimbangan bulanan yang dilaporkan oleh kader posyandu untuk dilakukan crosscheck dan pengecekan ulang oleh Puskesmas guna meminimalisir error sehingga akurasi datanya lebih baik. Namun demikian, meskipun sudah ada instruksi dan koordinasi dengan para kader posyandu, laporan hasil penimbangan balita yang disetorkan posyandu kepada pihak puskesmas masih terdapat kesalahan pencatatan sehingga datanya kurang akurat. Hal tersebut menyebabkan pihak puskesmas masih harus melakukan crosscheck dan perbaikan agar hasil pencatatannya lebih akurat.

Evaluasi rutin dilakukan untuk meningkatkan akurasi data dan koordinasi antar-OPD. Pemerintah juga melakukan audit kasus untuk mengidentifikasi faktor risiko stunting sehingga dapat diperbaiki dalam kebijakan ke depannya. Dalam Pelaksanaan Strategi Penurunan Prevalensi stunting, tentunya terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu permasalahan yang harus dievaluasi dalam strategi penurunan stunting adalah terkait komunikasi dan koordinasi antar OPD. Buruknya koordinasi tersebut menyebabkan terjadinya saling tumpang tindih kewenangan serta kebijakan yang dilakukan oleh antar OPD sehingga dalam menjalankan strategi penurunan stunting menjadi kurang maksimal. Pemerintah Kota



Bandung dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat suatu inovasi mind mapping untuk memetakan peran, wewenang, dan tupoksi dari sembilan belas OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan tujuan agar tugas dan tanggung jawab dari masing-masing dinas lebih terukur dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih peran. Selain terkait permasalahan koordinasi yang kurang baik antar dinas, yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, masih menurut sumber yang sama, permasalahan lain yang timbul dalam percepatan penurunan stunting sehingga patut untuk dievaluasi adalah terkait pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait stunting masih belum optimal. Adapun hal lainnya yang perlu dievaluasi adalah terkait pengukuran dan pencatatan berat badan dan tinggi balita yang dilakukan oleh kader posyandu, dimana dalam melakukan pengukuran dan pencatatan balita tersebut, kader posyandu acap kali melakukan kesalahan-kesalahan sehingga berdampak pada Tingkat akurasi data yang rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Kota Bandung dalam menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sejumlah upaya sudah dilakukan. Strategi ini meliputi pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga lain. Namun, kendala seperti kurangnya koordinasi yang efektif di tingkat pelaksana dan keterbatasan dalam penyerapan anggaran masih menghambat efektivitas program. Selain itu, aspek pencatatan dan pengukuran di posyandu masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan akurasi data stunting, sementara distribusi program tambahan makanan dan edukasi kesehatan belum merata di seluruh wilayah. Akibatnya, meskipun terdapat penurunan angka stunting di Kota Bandung, target nasional sebesar 14% belum tercapai.

Guna meningkatkan keberhasilan program penurunan stunting di Kota Bandung, pemerintah daerah sebaiknya memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lebih efektif untuk memaksimalkan penerapan program intervensi spesifik dan sensitif. Pemerintah juga perlu memperbaiki kualitas pelatihan bagi kader posyandu dalam hal pencatatan dan pengukuran, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan untuk perencanaan program. Selain itu, pengalokasian anggaran perlu dikelola dengan lebih efisien, dan perangkat daerah sebaiknya memastikan bahwa program seperti pemberian makanan tambahan serta edukasi tentang kesehatan dapat diakses merata oleh seluruh masyarakat. Melalui perbaikan ini, Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi stunting menuju target nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247-256.
- Archda, R., & Tumangger, J. (2019). Hulu-hilir penanggulangan stunting di Indonesia.
- Aryu, C. (2020). *Buku Epidemiologi Stunting*.
- Bandung, D. K. (2022). *Profil Kesehatan Kota Bandung tahun 2022*. Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209.



- Essa, W. Y. (2020). *Strategi Penanganan Stunting Kota Bandung*. Bandung: Bappelitbang.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Helmyati, S., Atmaka, D. R., Wisnusanti, S. U., & Wigati, M. (2020). *Stunting: Permasalahan dan Penanganannya*. UGM Press.
- Humphrey, A. J. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 250-265.
- Juliansyah, E. (2017). Strategi pengembangan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 19-37.
- Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Mitra, M. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(6), 254-261.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 225-229.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*.
- Salusu, J. (2003). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sitokdana, M. N., & Tanaamah, A. R. (2016). Strategi Pembangunan e-Culture di Indonesia. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 2(2).
- Sudikno, d. (2019). *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia Tahun 2019*.



Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Susanti, M., & Mardhiah, N. (2022). Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita. *Journal of Social and Policy Issues*, 1-6.

Syafie, I. K. (2022). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.

Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*.

Turmidzi, I. (2022). Implementasi Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 5(2), 90-100.